

SKRIPSI

ANALISIS PERBEDAAN LABA MENURUT UNDANG- UNDANG PAJAK PENGHASILAN NO.17 TAHUN 2000 DENGAN PSAK No. 17 PADA PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA PEKANBARU



OLEH:

TITIN SURIANI
NIM: 10373023699

JURUSAN AKUNTANSI

Program S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2010

ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN LABA MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN PSAK NO. 46 PADA PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA PEKANBARU

OLEH

TITIN SURIANI
10373023699

Penelitian ini dilakukan pada PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan laba menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 dengan PSAK No. 46. Jenis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada : Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Aktiva Tetap, dan data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan bagian akuntansi tentang tata cara perhitungan pajak yang dikukan oleh perusahaan.

Adapun permasalahan yang ditemui penulis pada penelitian yaitu adanya biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan menurut Undang-Undang Pajak Panghasilan. Disamping itu penulis juga menemukan adanya kekeliruan dalam pengelompokan aktiva tetap. Oleh sebab itu harus adanya koreksi fiskal atas laporan keuangan oleh perusahaan agar memenuhi Standar Akuntansi Keuangan No. 46.

Perbedaan yang terjadi dalam perhitungan Laba/ Rugi Akuntansi dengan Laba / Rugi Fiskal pada PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru ada yang bersifat sementara ada yang bersifat tetap. Sesuai dengan PSAK No. 46 perbedaan sementara akan menyebabkan timbulnya pajak tangguhan yang disajikan dalam neraca. Pajak Tangguhan ini akan hilang pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan penelitian penulis, perusahaan ternyata belum menerapkan PSAK N0. 46.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak Penghasilan, Laba / rugi Akuntansi (Komersil), Laba Rugi Fiskal, Beda Tetap, Beda Sementara.

i
DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
D. Metodologi penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian pajak	11
B. Fungsi Pajak	12
C. Sistem dan Pemungutan Pajak	13
D. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan	15
E. Subjek dan Objek Pajak	18
F. Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Pajak Peng- hasilan	25
G. Biaya (Beban).....	27
H. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No.46)	31

I. Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan	45
J. Perbedaan Tetap	47
K. Perbedaan Temporer	48
L. Rekonsiliasi Fiskal	50
M. Perhitungan Pajak Kini	54
N. Pajak Dalam Islam	57
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	63
B. Struktur Organisasi Perusahaan	64
C. Aktivitas Perusahaan	69
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perhitungan Laba Rugi Menurut Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum	71
B. Perhitungan Laba Rugi Menurut Undang-Undang Perpajakan	74
C. Perbedaan Laba Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Dengan PSAK No. 46	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah iuran kepada Negara dari rakyat berdasarkan Undang-Undang, dapat dipaksakan dan pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU. RI No.28 tahun 2007 : 2)

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pajak ini akan dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli di bidang ini :

Markus (2005 : 1) mengemukakan definisi pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari Negara.

Menurut Yusdianto Prabowo (2001 : 1) Pajak adalah Iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Brotodiharjo (1999: 2) Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2001 : 1)

Pajak adalah pemberian rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang mendasar antara lain :

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Pajak dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah atau tanpa jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak merupakan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta perkembangan dan pertumbuhan pembangunan nasional.

B. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi pajak budgetir (sumber keuangan Negara) dan fungsi regular (mengatur).

- a. Fungsi budgetir (Sumbangan Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetir artinya pajak merupakan salah satu sumber dana penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai; dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan bangunan, dan lain-lain.

- b. Fungsi Reguler (Mengatur). Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya dengan mengadakan perubahan pengembalian tarif, yaitu dengan memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan. (Resmi, 2003:12).

Pajak yang dibayar oleh rakyat itu bermacam-macam, berbagai jenis pajak itu dikelompokkan berdasarkan kriteria. Ada yang membagi pajak menjadi :

1. Pajak pusat dan pajak daerah
kriterianya adalah jika pemerintah pusat yang berwenang memungut pajaknya, maka pajak itu dikelompokkan ke dalam pajak pusat, sedangkan jika pemerintah daerah yang berwenang memungut pajaknya, maka dikelompokkan ke pajak daerah.
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
Kriterianya adalah jika pemajaknya dilakukan secara periodik dan secara yuridis beban pajak harus dipikul oleh subjek yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain maka pajak itu dikelompokkan ke dalam pajak langsung, jika pemajaknya dilakukan secara insidentil dan secara yuridis beban pajaknya biasa dialihkan kepada pihak lain, maka ia dikelompokkan ke dalam pajak tidak langsung.
3. Pajak subjektif dan pajak objektif
Kriterianya adalah jika dalam pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah subjek dan objeknya maka pajaknya dikelompokkan kedalam pajak subjektif, sedangkan jika dalam pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objek pajaknya baru subjeknya maka pajaknya dikelompokkan ke dalam pajak objektif. (Markus Muda, 2002: 5-6)

C. Sistem dan Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : *official assessment system, self assesmen system, dan with holding system.*

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini biasa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk menghitung, memotong dan memungut pajak, menyetorkan serta mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

D. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan

Laporan Laba Rugi dan Neraca adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi, baik yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan maupun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Standar Akuntansi Keuangan menggunakan pendekatan Aktiva – Kewajiban (*Asset – Liability Approach*), sedangkan Undang-undang Perpajakan menggunakan pendekatan – beban (*Revenue – Expense Approach*). Secara ekstrim dapat dikatakan, SAK lebih mengutamakan Neraca dibandingkan Laba Rugi, sedangkan Undang-Undang perpajakan lebih menitik beratkan pada laporan Laba Rugi. Standar Akuntansi Pajak Penghasilan yang diatur dalam PSAK No.46 dapat dikatakan sebagai metode akuntansi pajak penghasilan yang secara komprehensif mencoba menerapkan pendekatan aktiva-kewajiban. Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhannya terhadap konsekuensinya fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. PSAK No.46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam :

1. Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang untuk hal-hal berikut:

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva pada pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca
 - b. Transaksi-transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan di dalam laporan (komersial) perusahaan.
2. Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan, seperti yang diatur dalam PSAK No. 46 antara lain:

- a. Beban pajak (*tax expense*) atau manfaat pajak (*tax benefit*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current Tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu atau dalam periode berjalan.
- b. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau dalam tahun berjalan.
- c. Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan atas penghasilan kena pajak (penghasilan objek – tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000).
- d. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final.
- e. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.

- f. Laba atau rugi fiskal atau penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang tentang dalam tahun berjalan.
- g. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).
- h. Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.
 - 2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Secara garis besar, prinsip-prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak penghasilan tahun berjalan yang kurang bayar atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax assets*), sedang pajak penghasilan tahun berjalan yang telah dibayar sebagai Aktiva pajak kini (*current tax assets*).
- 2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedang efek perubahan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan.
- 3. Pengurangan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan pada peraturan yang berlaku; efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
- E. Penilaian (kembali) aktiva pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aktiva pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang. (Hernanto: 2003:112)

E. Subjek dan Objek Pajak

Defenisi subjek pajak adalah pihak menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-Undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak.

Menurut Bohari (2001: 49) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek pajak hukum yang dapat dikenakan pajak.

Dalam UU pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 ada tiga pihak yang menjadi subjek pajak, yaitu:

1. a. Orang pribadi

Yang dimaksud orang pribadi menurut Undang-Undang penghasilan adalah manusia yang masih hidup. Orang pribadi tidak merujuk pada manusia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya. Dengan demikian yang dimaksud orang pribadi yaitu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah uzur, entah ia berprofesi sebagai petani, karyawan, pengangguran, tunawisma maupun pejabat Negera.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan

Undang-Undang pajak penghasilan tahun 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf b menjelaskan badan, yaitu sekumpulan hutang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang

tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Bentuk Usaha Tetap

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang pajak penghasilan, bentuk usaha tetap adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel.
- g. Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan.

- j. Agen atau pegawai dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

Sedangkan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 :

Adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.

Kartasasmita (2001:4) mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya, sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan arena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan kependidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemimpinan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Dan pembagian sisa hasil koperasi
7. Royalty
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
10. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
13. Premi asuransi
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
15. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan tertentu, Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenakan pajak penghasilan. Pengecualian ini mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak, tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut, ataupun demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Menurut Waluyo dan Ilyas (2003 :4) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Sepanjang tidak ada

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam saham bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan akuntansi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna & asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia syaratnya:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 persen dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha badan tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Mengenai biaya-biaya yang tidak dapat kekurangan (*non deductible expense*) dari penghasilan bruto sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000, biaya-biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha Bank dan sewa guna usaha dengan hak polis, cadangan untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea Siswa, yang dibayarkan oleh orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah pembayaran yang melebihi kewajiban yang diberikan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan kepada badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, yang ditetapkan oleh menteri keuangan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan serta warisan.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya yang diberikan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan oleh anggota persekutuan, firma atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan palaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- 12) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya yang bersifat final.

F. Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh oleh setiap wajib pajak, yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berbeda dengan hal yang diatas, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK.) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia, penghasilan adalah :

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut UU Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 yang termasuk dalam penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya, sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
 - b. Keuangan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah. Bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan kependidikan atau badan sosial pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan. Atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga termasuk premi, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi.
8. Royalty.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

G. Biaya (beban)

Pengertian mengenai biaya atau beban terdapat dalam pasal 6 UU No. 17 tahun 2000, yaitu:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dua bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk pembelian, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, *royalty*, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aktiva lain berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan lain yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya di dalam laporan laba rugi komersil.
 - 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian mengenai penghapusan piutang atau pembebasan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - 4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Biaya-biaya yang dimaksud disini adalah biaya sehari-hari yang telah dibebankan pada tahun pengeluaran. Dengan demikian biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang pendapatan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti, deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha.
- b. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan. Yang ketentuan dan syarat-syarat ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pemilik yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi

pemeluk agama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan atas sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Menurut UU No. 17 tahun 2000 harta yang dapat disusutkan adalah harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud, yang dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan yang memiliki masa lebih dari satu tahun.

Di dalam pelaksanaannya harta berwujud yang dapat disusutkan dibagi atas dua jenis yaitu harta berwujud bangunan dan harta berwujud bukan bangunan. Penyusutan jenis harta bukan bangunan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (*straight line methode*) atau juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atau nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (*declining balance mathode*) dengan

syarat dilakukan secara konsisten dan apabila ada perubahan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak.

H. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46)

PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Standar Akuntansi Pajak Penghasilan ini menetapkan penyesuaian yang diperlukan akibat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan terutang menurut peraturan perpajakan dengan beban pajak penghasilan secara komersial. Dalam menentukan dan atau mengakui penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban), terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi komersial dan pajak penghasilan. Perbedaan tersebut mencakup beda tetap dan beda waktu atau perbedaan temporer.

Beda tetap adalah suatu jumlah yang tidak diakui oleh Direktorat jenderal Pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak. Beda tetap tersebut meliputi secara akuntansi merupakan penghasilan, namun bukan merupakan objek PPh atau telah dikenakan PPh yang bersifat final. Sebaliknya, secara akuntansi bukan merupakan penghasilan tetapi merupakan objek pajak menurut UU pajak penghasilan. Demikian juga, secara akuntansi biasa dibebankan sebagai biaya tetapi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan sebaliknya.

Perbedaan temporer (*Time Difference*) adalah perbedaan antara “*Accounting Base*” yaitu nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban

menurut akuntansi dengan “*Tax Base*” yaitu nilai buku fiskal yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (rugi fiskal) yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan. Perbedaan ini muncul akibat beda metode antara akuntansi dan PPh, yang terdiri dari: penyusutan, sewa guna usaha dengan hak opsi, penyisihan dengan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, perbedaan metode penilaian persediaan (akuntansi dipergunakan LIFO namun tidak dibenarkan untuk PPh), penilaian persediaan berdasarkan ‘harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah’, penggabungan, peleburan, pemekaran berdasarkan nilai buku dan harga pasar, investasi saham berdasarkan ‘*cost method*’ dan ‘*equity method*’. Pengaruh pajak yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer diakui sebagai “aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets/ DTA*)” atau kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability/DTL*).

Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Perbedaan waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan waktu akan menimbulkan asset/kewajiban pajak tangguhan, sementara perbedaan tetap tidak.

a. Beban Pajak Tangguhan Dan Pendapatan Pajak Tangguhan

Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan.

b. Asset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

c. Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

d. Pencatatan dan Penyajian

Pengakuan asset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam aplikasinya, tarif maksimum PPh 30% digunakan karena alasan kepraktisan. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan:

Keterangan	Debet	Kredit
Aset Pajak Tanggungan	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxxx

Sementara itu jurnal mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah:

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Pajak Tangguhan	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxx

Penyajian pajak tangguhan:

- a. Asset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari asset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
- b. Asset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari asset pajak kini (*tax receivable/prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*).
- c. Asset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai asset atau kewajiban lancar.
- d. Asset pajak kini harus dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah nettoanya disajikan dalam neraca.
- e. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
- f. Asset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan hutang PPh 29.
- g. PPh final, Apabila nilai tercatat asset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai asset

atau kewajiban kena pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, sebab pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

- h. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka dan utang pajak.
- i. Akun PPh dibayar dimuka harus disajikan dari PPh final yang masih harus dibayar.

Dalam akuntansi pajak Penghasilan (PPh), laba dibedakan antara laba akuntansi (*accounting profit*), laba komersial dengan laba fiskal (*taxable profit*), atau Penghasilan Kena Pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal adalah laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan lebih ditujukan untuk menjadi dasar perhitungan PPh (IAI, 2004).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode.

Pajak terkini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Kewajiban pajak tangguhan (*defferered tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
- b. Sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa : perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi

(*settled*); atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Dasar pengenaan pajak (DPP) aktiva atau kewajiban adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam perhitungan laba fiskal. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat berupa :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah suatu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
4. Surat Ketetapan Nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan atau denda. Beban pajak (Pajak Penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan kini) dan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan tangguhan).

Pengakuan Aktiva Pajak Kini (*current Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Kini (*current tax Liabilities*) : Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aktiva.

Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Liabilities*) karena adanya Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*). Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak :

- a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau
- b. Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang:
 - 1) Bukan transaksi penggabungan usaha; dan
 - 2) Pada saat transaksi, tidak dipengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal.

Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba fiakal. Berikut ini disajikan contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan

kewajiban pajak tangguhan, misalnya : Penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi. Perbedaan temporernya adalah selisih antara nilai tercatat aktiva tetap dengan DPP-nya. DPP aktiva tetap adalah sebesar harga perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dalam perhitungan fiskal. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*). Sebaliknya, apabila penyusutan menurut pajak lebih lambat dibandingkan penyusutan menurut akuntansi maka timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal, sehingga timbul aktiva pajak tangguhan.

Perbedaan temporer juga timbul apabila :

- a. Biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang secara substansi merupakan suatu akuisi, dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal.
- b. Pada saat pengakuan awal, Dasar Penggunaan Pajak aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila merupakan suatu akuisi, dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal.

- c. Pada saat pengakuan awal, Dasar Pengenaan Pajak aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila perusahaan memperoleh bantuan atau sumbangan (yang bukan merupakan objek pajak) dalam bentuk aktiva.

Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aktiva atau kewajiban, sebagai contoh apabila sebagian atau seluruh harga pemerolehan suatu aktiva tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, tergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aktiva :

- a. Dalam suatu penggabungan usaha, perusahaan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill atau goodwill negatif.
- b. Apabila transaksi mempengaruhi laba akuntansi atau laba fiskal, perusahaan mengakui beban (penghasilan) pajak tangguhan pada laporan laba rugi;
- c. Apabila sifat transaksi bukan penggabungan usaha, tidak mempengaruhi laba atau laba fiskal maka perusahaan tidak diperkenankan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan pada pengakuan awal ataupun pada periode selanjutnya (*subsequent recognition*), karena penyesuaian nilai tercatat aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang transparan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk mengakui perubahan selanjutnya dalam

kewajiban atau aktiva pajak tangguhan yang belum diakui pada saat aktiva tersebut disusutkan.

Aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari :

- a. Goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
- b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak memperoleh baik laba akuntansi maupun laba fiskal.

Pengakuan suatu kewajiban mengandung makna bahwa nilai tercatat kewajiban akan diselesaikan pada masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya. Pada saat sumber daya tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, sebagian atau seluruh jumlah sumber daya tersebut mungkin dapat dikurangkan dari laba fiskal pada periode setelah pengakuan kewajiban. Dalam hal ini, perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat kewajiban dan DPP-nya. Oleh karena itu, timbul aktiva pajak tangguhan berupa penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Demikian pula halnya, apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah dari DPP-nya, maka selisihnya

merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa akan datang.

Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aktiva pajak tangguhan adalah biaya manfaat pensiun (*retirement benefit cost*). Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba akuntansi, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Perbedaan temporer adalah besar selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPP-nya (DPP-nya umum adalah nol). Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan aktiva pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar.

Penggunaan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada masa yang akan datang terjadi dalam bentuk pengurangan laba fiskal. Namun, manfaat ekonomi berupa pengurangan pembayaran pajak hanyalah dinikmati oleh perusahaan apabila perusahaan mempunyai laba fiskal dalam jumlah yang memadai sehingga dalam realisasi tersebut dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

Salah satu contoh timbulnya aktiva pajak tangguhan pada saat pengakuan awal suatu aktiva, adalah bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan akuntansi bantuan atau sumbangan tersebut yang berupa suatu aktiva

berwujud boleh disusutkan tetapi untuk tujuan fiskal tidak, aktiva tersebut tidak boleh disusutkan. Oleh karena itu nilai tercatat aktiva tersebut akan lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya sehingga timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perusahaan tidak mengakui aktiva pajak tangguhan dari bantuan atau sumbangan tersebut. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasikan.

Perlakuan akuntansi untuk pengaruh pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi pada tahun berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari : transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas saat periode yang sama atau periode yang berbeda penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi.

Pada umumnya, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam perhitungan penghasilan kena pajak (rugi pajak). Pajak tangguhan yang berasal dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Sebagai contoh adalah biaya pengembangan yang telah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 20 tentang Biaya Riser dan Pengembangan dan diamortisasi sebagai beban pada laporan laba rugi, namun untuk kepentingan pajak biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal.

Penyajian Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak : Aktiva pajak dan Kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan harus dibebankan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.

Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

I. Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, cara perhitungan laba dalam UU Pajak Penghasilan sama dengan yang dikenal dalam akuntansi. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara lain :

1. Defenisi penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan berbeda dengan defenisi penghasilan menurut akuntansi.
2. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan dibebankan atas :
 - a. Penghasilan yang objek pajak yang dikenal pajak penghasilan bersifat tidak final.
 - b. Penghasilan yang objek pajak yang dikenal pajak penghasilan bersifat final, didalam akuntansi tidak dikenal perbedaan tersebut.
3. Didalam Undang-Undang pajak penghasilan biaya dibedakan atas :
 - a. Biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan (*deductable expenses costs*).

- b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan
(*non deductible expenses costs*).

Selain perbedaan tersebut, masih ada perbedaan antara akuntansi dan prinsip Undang-Undang pajak penghasilan. Markus dan Yujana (2000:714-715) mengatakan perbedaan-perbedaan dalam menghitung laba rugi menurut akuntansi dan Undang-Undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan saat pengakuan penghasilan dan biaya tidak selalu sama dengan saat pengakuan penghasilan dan biaya di dalam akuntansi.
2. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan prinsip perhitungan untung rugi penjualan harta.
3. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan, pencatatan besarnya penghasilan dan biaya harus berdasarkan “adap kebiasaan pedagang yang baik”, yaitu sesuai harga pasar yang wajar. Artinya Undang-Undang pajak penghasilan tidak mengizinkan jika ada wajib pajak yang melakukan rekayasa pencatatan penghasilan dan biaya, misalnya dengan cara mark up atau mark down atau melakukan transfer pricing dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka untuk memperkecil pajak penghasilan yang harus dibayar.
4. Karena perbedaan-perbedaan tersebut, pengertian kerugian usaha antara Undang-Undang pajak penghasilan dan akuntansi juga berbeda.

Perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam laporan keuangan biasa dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Perbedaan tersebut adalah perbedaan tetap yang sifatnya tetap, serta perbedaan sementara yang sifatnya sementara dan akan menghilang pada periode mendatang.

J. Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Menurut Munawir (2003:85): Perbedaan tetap adalah perbedaan akibat adanya pengakuan biaya dan pendapatan pada laporan komersial tetapi tidak pada laporan fiskal atau sebaliknya.

Perbedaan tersebut mengakibatkan laba yang diakui secara komersial berbeda dengan laba secara fiskal. Perbedaan tetap disebabkan karena menurut prinsip akuntansi, suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan suatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial, sedangkan menurut prinsip pajak suatu penerimaan tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan suatu pengeluaran tidak pernah diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan fiskal, atau sebaliknya.

Perbedaan ini timbul karena dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat biaya dan pendapatan yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan. Perbedaan ini bersifat tetap karena selisih laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang disebabkan perbedaan ini tidak pernah dapat dikompensasikan pada masa yang akan datang.

K. Perbedaan Temporer / Waktu (*Temporer / timing difference*)

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang timbul sebagai akibat perbedaan-perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Secara garis besarnya perbedaan ini dapat dibedakan atas empat variasi sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang menghitung penghasilan kena pajak dikurangkan lebih awal dari pada pengurangan dalam menentukan laba sebelum pajak untuk tahun komersial.

- b. Biaya-biaya yang menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat (kemudian) dari pada perhitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial.
- c. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat dan pada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial.
- d. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih awal dari pada menghitung pajak untuk tujuan komersial.

Perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pajak yang ditangguhkan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

1. Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan laba akuntansi sebelum pajak (*pretax accounting income*) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (*taxable income*).

2. Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan bisa terjadi apabila biaya atau kerugian diakui oleh akuntansi sebagai pengurang penghasilan pada tahun sesudah biaya atau kerugian itu diakui oleh pajak (akuntansi masih mencatatnya di neraca, tetapi pajak tidak lagi mencatatnya di neraca tetapi di laporan laba rugi). Dalam hal ini maka pada tahun ini pajak mengakui biaya lebih besar dari akuntansi sehingga penghasilan kena pajak akan menjadi lebih kecil dari pada laba akuntansi PSAK 46 mendefenisikan kewajiban pajak

tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer.

Contoh : Dalam Laporan Laba Rugi PT. ABC tahun 2001 terdapat beda waktu atas pembebanan penyusutan meja pajangan dan mesin kantor, pajak mengakui beban penyusutan lebih besar dan yang diakui akuntansi sehingga penghasilan kena pajak tahun 2001 lebih kecil dan laba akuntansi. Hal ini menimbulkan kewajiban pajak tangguhan.

Menurut akuntansi di tahun 2001 :

Beban penyusutan meja pajangan	=Rp. 6.000.000
Beban penyusutan beban kantor	<u>=Rp. 16.000.000</u>
Total	Rp. 22.000.000

Menurut pajak di tahun 2001 :

Beban penyusutan meja pajangan	=Rp. 7.500.000
Beban penyusutan mesin kantor	<u>=Rp. 20.000.000</u>
Total	Rp. 27.500.000

Perbedaan waktu/temporer =Rp. 5.500.000

Tarif PPh =Rp. 30%

Kewajiban pajak tangguhan Rp. 1.650.000

Adanya kewajiban pajak tangguhan tersebut menimbulkan beban pajak tangguhan.

Sehingga jurnalnya sebagai berikut :

Beban pajak tangguhan Rp 1.650.000

Kewajiban pajak tangguhan Rp 1.650.000

L. Rekonsiliasi Fiskal

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi. Koreksi ini dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dihasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu beda permanen (*permanent difference*) dan beda temporer (*temporary difference*). Kedua jenis koreksi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Beda Tetap

Beda tetap (*permanent difference*) disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban tertentu diakui pada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan komersial.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 menjelaskan adanya penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan objek pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak final.

- b. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang ditetapkan lain dalam peraturan menteri keuangan.
- c. Jumlah imbalan yang melebihi kewajiban yang dibagikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemberian gaji yang terlalu besar, pembayaran bunga atas pinjaman diatas bunga pasar dan sebagainya,
- d. Beban kontribusi sosial seperti sumbangan dan zakat.
- e. Sanksi perpajakan berupa denda dan bunga.
- f. Beban-beban yang berkaitan dengan jamuan.
- g. Pajak penghasilan.
- h. Lain-lain.

b. Beda Waktu (*temporary difference*)

Sedangkan beda waktu (*temporary difference*) disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.

- b. Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*) tidak boleh disusutkan oleh sisa penyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*).
- c. Penilaian persediaan, berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sementara dalam pelaporan komersial kita mengenal metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (LIFO), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dan lain-lain.
- d. Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berupa berwujud maupun yang tak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Peraturan perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Penggolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusuta	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1.	Kelompok I	4 Tahun	25 %	50%
2.	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
3.	Kelompok III	16 Tahun	6,5%	12,5%
4.	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
5.	Bangunan Permanen	20 Tahun	5%	0
6.	Bangunan Nonpermanen	10 Tahun	10%	0

Sumber: Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 10

Tabel II.2
Masa Manfaat Dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

No	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusuta	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1.	Kelompok I	4 Tahun	25 %	50%
2.	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
3.	Kelompok III	16 Tahun	6,5%	12,5%
4.	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

Sumber: Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 10

Perpajakan tidak mengakui beban yang berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. Namun beban tersebut dibukukan pada laporan keuangan komersial.

M. Perhitungan Pajak Kini

Pajak kini adalah beban penghasilan perusahaan (beban) yang di hitung berdasarkan tarif efektif pajak penghasilan dikalikan dengan laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak penghasilan kini dibagi menjadi dua kelompok yaitu final non-final yang disajikan sebagai berikut:

Tarif pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Tarif Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Dan Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Sampai dengan rp. 50 Juta	10%
Diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	15%
Diatas Rp. 100 Juta	30%

Sumber: Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 12

Pada tahun 2002 PT X mengalami rugi fiskal sebesar Rp 1000.000.000. Pada tahun 2003, PT X dapat memperoleh laba fiskal sebesar Rp 1.515.666.667. Dengan demikian, terdapat rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sebesar Rp 1.000.000.000 pada tahun 2003. Laba kena pajak adalah sebesar Rp 515.666.667, maka beban pajak terkini akan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 5.000.000$$

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 15\% = \text{Rp. } 7.500.000$$

$$\text{Rp. } 415.666.667 \times 30\% = \text{Rp. } \underline{124.700.000} +$$

$$\text{Beban Pajak Kini} \qquad \text{Rp. } 137.200.000$$

Beban pajak kini akan menjadi pajak terutang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 29. Jurnal pembebanan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

(jurnal pencatatan-1)

$$\text{Beban pajak kini} \qquad \text{Rp. } 137.200.000$$

$$\text{Hutang pajak penghasilan pasal 29} \qquad \text{Rp. } 137.200.000$$

Namun perlu diketahui, beban pajak yang ditangguhkan oleh perusahaan belum bersifat final apabila PT X memiliki saldo pajak dibayar dimuka yang sifatnya non-final atau dapat dikreditkan. Beban pajak dibayar dimuka yang sifatnya non-final yang telah dibayar oleh PT X adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan atas setiap barang impor yang dikenakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai atau bank devisa. Barang impor yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan sebesar 2,5%, sedangkan barang impor yang tidak menggunakan angka pengenal impor akan dikenakan sebesar 7%.

Jika selama tahun 2004 PT X ternyata melakukan impor atas bahan baku dengan nilai impor sebesar US\$ 1.000.000 (kurs pajak, US\$ 1 = Rp 8.500), dan barang tersebut menggunakan angka pengenal impor maka jurnal pencatatan pembelian dan pajak penghasilan pasal 22 (2,5%) adalah sebagai berikut:

(jurnal pencatatan-2)

Persediaan bahan baku	Rp. 8.500.000.000
-----------------------	-------------------

Pajak penghasilan pasal 22 Dibayar dimuka	Rp. 212.500.000
---	-----------------

Kas

Rp.8.712.500.000

Pencatatan pembelian bahan baku dan pajak penghasilan pasal 22 dibayar dimuka
(Rp. 8.500.000.000 x 2,5%).

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 23, deviden, bunga, royalty, hadiah penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, konsultan dan jasa lain dikenakan pajak penghasilan tidak final sebesar 15%. Jika selama tahun 2004 PT X juga memberikan jasa konsultasi teknik kepada pelanggannya dengan fee sebesar Rp. 35.000.000, maka pendapatan tersebut wajib dikenakan pajak penghasilan non-final sebesar 15%.

3. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan yang berasal dari luar negeri dan bersifat non-final. Tarif yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 24 adalah sama dengan tarif yang dipakai untuk menghitung pajak penghasilan badan.

Jika PT X menerima penghasilan bersih dari unit bisnisnya yang berada di jepang sebesar Rp. 30.000.000 maka akan dijurnal sebagai berikut:

(jurnal pencatatan-3)

Kas	Rp. 27.000.000
Pajak penghasilan pasal 24 dibayar dimuka	Rp. 3.000.000
Pendapatan	Rp. 30.000.000

N. Pajak Dalam Islam

1. Defenisi Pajak

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyra atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya : “pungutan yang ditarik

dari rakyat oleh para penarik pajak” atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

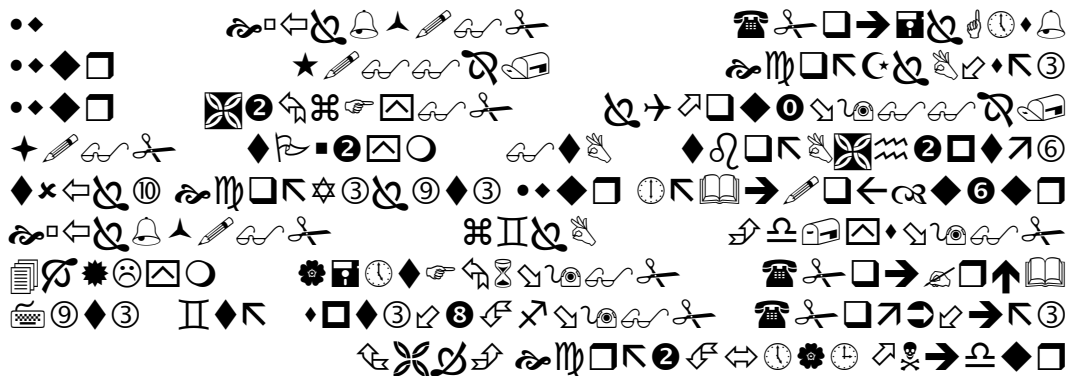
Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah “suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun dalam sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak :

- a) Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini adalah Negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, elit penguasa.
- b) Pajak dengan konsep “kontra-prestasi” (Jizyah: Al-Qur’an) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara dengan Pajak Jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.
- c) Pajak dengan konsep etik dan ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya. (Mas’ud, 2007 : 71)

Sedangkan dalam bukunya Abdullah (2007:220) yang dikutip dari tafsir Al-Manar karangan M. Rasyid Ridha mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX Hijriah, pada masa nabi Muhammad SAW pajak

baru diwajibkan pada orang-orang kafir Dzimnya dan Harby. Yang dilatarbelakangi surat At-Taubah (9:29) yaitu:



“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan meraka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

2. Perbedaan Pajak dengan Zakat

Imam Abu Ja’far Atr-Thahawi rahimahumullah dalam kitabnya Syarh Ma’ani Al-Atsar (2/30-31), berkata bahwa Al-Usyr yang telah dihapus kewajibanya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliah”. Kemudian beliau melanjutkan:”...hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat...”.

Perbedaan lain yang sangat antara pajak dengan zakat diantaranya:

- a. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah

sampai nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa disuatu tempat.

- b. Zakat berlaku bagi kaum muslim saja, hal ini lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir, karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal ditanah kekuasaan kaum muslimin.
- c. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin dan dikembalikan/diberikan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Zakat adalah salah satu bentuk syari'at islam yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasaannya.

Diantara pemasuk sumber Negara yang pernah terjadi dizaman Rasulullah SAW adalah :

- 1. Zakat, yaitu kewajiban setiap muslim yang mempunyai harta hingga mencapai nisabnya. Disamping pemilik harta berhak

mengeluarkan sendiri zakatnya dan diberikan kepada yang membutuhkan, penguasa juga mempunyai hak untuk menarik zakat dari kaum muslim yang memiliki harta, lebih-lebih apabila mereka menolaknya, kemudian zakat itu dikumpulkan para petugas zakat (amil) yang ditugaskan oleh pemimpinnya, dan dibagikan sesungguhnya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-taubah: kita lihat adanya amil-amil zakat yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslim yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.

2. Harta warisan yang tidak habis terbagi. Ada dua pendapat yang masyhur dikalangan faraidh. Pendapat yang pertama, harus dikembalikan kepada masing-masing disesuaikan dengan kedekatan mereka kepada mayit, kecuali salah satu dari istri atau pendapat kedua mengatakan, semua harta yang tidak terbagi/kelebihan, maka dilakukan kebaitul mal/kas Negara. Walaupun demikian, suatu ketika harta yang kelebihan itu dikembalikan kepada masing-masing ahli waris, semisalnya ada seorang yang meninggalkan warisannya seorang janda saja maka janda tersebut mendapat haknya $\frac{1}{6}$ dan sisanya mau tidak mau dikembalikan ke baitul mal.
3. Jizyah, adalah harta/ upeti yang diambil dari orang-orang kafir yang diizinkan di Negeri islam sebagai jaminan keamanannya.

4. Ghainimah dan fai'. Ghainimah adalah harta orang kafir (al-harbi) yang dikuasai muslimin dengan adanya peperangan. Sedangkan fai' adalah harta orang kafir yang ditinggalkan dan dikuasai oleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan.
5. Shadaqah tathawaf, yaitu rakyat menyumbang dengan suka rela kepada Negara digunakan untuk kepentingan bersama.
6. Hasil tambang dan semisalnya. (Almanhaj.or.id)

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah iuran kepada Negara dari rakyat berdasarkan Undang-Undang, dapat dipaksakan dan pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU. RI No.28 tahun 2007 : 2)

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pajak ini akan dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli di bidang ini :

Markus (2005 : 1) mengemukakan definisi pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari Negara.

Menurut Yusdianto Prabowo (2001 : 1) Pajak adalah Iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Brotodiharjo (1999: 2) Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2001 : 1)

Pajak adalah pemberian rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang mendasar antara lain :

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Pajak dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah atau tanpa jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak merupakan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta perkembangan dan pertumbuhan pembangunan nasional.

B. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi pajak budgetir (sumber keuangan Negara) dan fungsi regular (mengatur).

- a. Fungsi budgetir (Sumbangan Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetir artinya pajak merupakan salah satu sumber dana penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai; dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan bangunan, dan lain-lain.

- b. Fungsi Reguler (Mengatur). Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya dengan mengadakan perubahan pengembalian tarif, yaitu dengan memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan. (Resmi, 2003:12).

Pajak yang dibayar oleh rakyat itu bermacam-macam, berbagai jenis pajak itu dikelompokkan berdasarkan kriteria. Ada yang membagi pajak menjadi :

1. Pajak pusat dan pajak daerah
kriterianya adalah jika pemerintah pusat yang berwenang memungut pajaknya, maka pajak itu dikelompokkan ke dalam pajak pusat, sedangkan jika pemerintah daerah yang berwenang memungut pajaknya, maka dikelompokkan ke pajak daerah.
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
Kriterianya adalah jika pemajaknya dilakukan secara periodik dan secara yuridis beban pajak harus dipikul oleh subjek yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain maka pajak itu dikelompokkan ke dalam pajak langsung, jika pemajaknya dilakukan secara insidental dan secara yuridis beban pajaknya biasa dialihkan kepada pihak lain, maka ia dikelompokkan ke dalam pajak tidak langsung.
3. Pajak subjektif dan pajak objektif
Kriterianya adalah jika dalam pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah subjek dan objeknya maka pajaknya dikelompokkan kedalam pajak subjektif, sedangkan jika dalam pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objek pajaknya baru subjeknya maka pajaknya dikelompokkan ke dalam pajak objektif. (Markus Muda, 2002: 5-6)

C. Sistem dan Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : *official assessment system, self assesmen system, dan with holding system.*

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikkian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini biasa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk menghitung, memotong dan memungut pajak, menyetorkan serta mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

D. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan

Laporan Laba Rugi dan Neraca adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi, baik yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan maupun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Standar Akuntansi Keuangan menggunakan pendekatan Aktiva – Kewajiban (*Asset – Liability Approach*), sedangkan Undang-undang Perpajakan menggunakan pendekatan – beban (*Revenue – Expense Approach*). Secara ekstrim dapat dikatakan, SAK lebih mengutamakan Neraca dibandingkan Laba Rugi, sedangkan Undang-Undang perpajakan lebih menitik beratkan pada laporan Laba Rugi. Standar Akuntansi Pajak Penghasilan yang diatur dalam PSAK No.46 dapat dikatakan sebagai metode akuntansi pajak penghasilan yang secara komprehensif mencoba menerapkan pendekatan aktiva-kewajiban. Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhannya terhadap konsekuensinya fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. PSAK No.46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam :

1. Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang untuk hal-hal berikut:

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva pada pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca
 - b. Transaksi-transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan di dalam laporan (komersial) perusahaan.
2. Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan, seperti yang diatur dalam PSAK No. 46 antara lain:

- a. Beban pajak (*tax expense*) atau manfaat pajak (*tax benefit*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current Tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu atau dalam periode berjalan.
- b. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau dalam tahun berjalan.
- c. Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan atas penghasilan kena pajak (penghasilan objek – tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000).
- d. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final.
- e. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.

- f. Laba atau rugi fiskal atau penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang tentang dalam tahun berjalan.
- g. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).
- h. Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.
 - 2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Secara garis besar, prinsip-prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak penghasilan tahun berjalan yang kurang bayar atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax assets*), sedang pajak penghasilan tahun berjalan yang telah dibayar sebagai Aktiva pajak kini (*current tax assets*).
- 2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedang efek perubahan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan.
- 3. Pengurangan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan pada peraturan yang berlaku; efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
- E. Penilaian (kembali) aktiva pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aktiva pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang. (Hernanto: 2003:112)

E. Subjek dan Objek Pajak

Defenisi subjek pajak adalah pihak menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-Undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak.

Menurut Bohari (2001: 49) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek pajak hukum yang dapat dikenakan pajak.

Dalam UU pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 ada tiga pihak yang menjadi subjek pajak, yaitu:

1. a. Orang pribadi

Yang dimaksud orang pribadi menurut Undang-Undang penghasilan adalah manusia yang masih hidup. Orang pribadi tidak merujuk pada manusia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya. Dengan demikian yang dimaksud orang pribadi yaitu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah uzur, entah ia berprofesi sebagai petani, karyawan, pengangguran, tunawisma maupun pejabat Negera.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan

Undang-Undang pajak penghasilan tahun 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf b menjelaskan badan, yaitu sekumpulan hutang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang

tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Bentuk Usaha Tetap

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang pajak penghasilan, bentuk usaha tetap adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel.
- g. Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan.

- j. Agen atau pegawai dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

Sedangkan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 :

Adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.

Kartasasmita (2001:4) mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya, sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan arena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan kependidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemimpinan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Dan pembagian sisa hasil koperasi
7. Royalty
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
10. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
13. Premi asuransi
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
15. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan tertentu, Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenakan pajak penghasilan. Pengecualian ini mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak, tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut, ataupun demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Menurut Waluyo dan Ilyas (2003 :4) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Sepanjang tidak ada

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam saham bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan akuntansi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna & asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia syaratnya:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 persen dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha badan tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Mengenai biaya-biaya yang tidak dapat kekurangan (*non deductible expense*) dari penghasilan bruto sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000, biaya-biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha Bank dan sewa guna usaha dengan hak polis, cadangan untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea Siswa, yang dibayarkan oleh orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah pembayaran yang melebihi kewajiban yang diberikan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan kepada badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, yang ditetapkan oleh menteri keuangan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan serta warisan.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya yang diberikan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan oleh anggota persekutuan, firma atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan palaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- 12) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya yang bersifat final.

F. Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh oleh setiap wajib pajak, yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berbeda dengan hal yang diatas, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK.) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia, penghasilan adalah :

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut UU Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 yang termasuk dalam penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya, sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
 - b. Keuangan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah. Bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan kependidikan atau badan sosial pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan. Atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga termasuk premi, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi.
8. Royalty.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

G. Biaya (beban)

Pengertian mengenai biaya atau beban terdapat dalam pasal 6 UU No. 17 tahun 2000, yaitu:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dua bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk pembelian, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, *royalty*, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aktiva lain berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan lain yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya di dalam laporan laba rugi komersil.
 - 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian mengenai penghapusan piutang atau pembebasan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - 4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Biaya-biaya yang dimaksud disini adalah biaya sehari-hari yang telah dibebankan pada tahun pengeluaran. Dengan demikian biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang pendapatan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti, deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha.
- b. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan. Yang ketentuan dan syarat-syarat ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pemilik yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi

pemeluk agama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan atas sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Menurut UU No. 17 tahun 2000 harta yang dapat disusutkan adalah harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud, yang dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan yang memiliki masa lebih dari satu tahun.

Di dalam pelaksanaannya harta berwujud yang dapat disusutkan dibagi atas dua jenis yaitu harta berwujud bangunan dan harta berwujud bukan bangunan. Penyusutan jenis harta bukan bangunan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (*straight line methode*) atau juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atau nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (*declining balance mathode*) dengan

syarat dilakukan secara konsisten dan apabila ada perubahan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak.

H. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46)

PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Standar Akuntansi Pajak Penghasilan ini menetapkan penyesuaian yang diperlukan akibat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan terutang menurut peraturan perpajakan dengan beban pajak penghasilan secara komersial. Dalam menentukan dan atau mengakui penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban), terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi komersial dan pajak penghasilan. Perbedaan tersebut mencakup beda tetap dan beda waktu atau perbedaan temporer.

Beda tetap adalah suatu jumlah yang tidak diakui oleh Direktorat jenderal Pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak. Beda tetap tersebut meliputi secara akuntansi merupakan penghasilan, namun bukan merupakan objek PPh atau telah dikenakan PPh yang bersifat final. Sebaliknya, secara akuntansi bukan merupakan penghasilan tetapi merupakan objek pajak menurut UU pajak penghasilan. Demikian juga, secara akuntansi biasa dibebankan sebagai biaya tetapi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan sebaliknya.

Perbedaan temporer (*Time Difference*) adalah perbedaan antara “*Accounting Base*” yaitu nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban

menurut akuntansi dengan “*Tax Base*” yaitu nilai buku fiskal yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (rugi fiskal) yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan. Perbedaan ini muncul akibat beda metode antara akuntansi dan PPh, yang terdiri dari: penyusutan, sewa guna usaha dengan hak opsi, penyisihan dengan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, perbedaan metode penilaian persediaan (akuntansi dipergunakan LIFO namun tidak dibenarkan untuk PPh), penilaian persediaan berdasarkan ‘harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah’, penggabungan, peleburan, pemekaran berdasarkan nilai buku dan harga pasar, investasi saham berdasarkan ‘*cost method*’ dan ‘*equity method*’. Pengaruh pajak yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer diakui sebagai “aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets/ DTA*)” atau kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability/DTL*).

Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Perbedaan waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan waktu akan menimbulkan asset/kewajiban pajak tangguhan, sementara perbedaan tetap tidak.

a. Beban Pajak Tangguhan Dan Pendapatan Pajak Tangguhan

Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan.

b. Asset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

c. Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

d. Pencatatan dan Penyajian

Pengakuan asset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam aplikasinya, tarif maksimum PPh 30% digunakan karena alasan kepraktisan. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan:

Keterangan	Debet	Kredit
Aset Pajak Tanggungan	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxxx

Sementara itu jurnal mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah:

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Pajak Tangguhan	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxx

Penyajian pajak tangguhan:

- a. Asset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari asset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
- b. Asset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari asset pajak kini (*tax receivable/prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*).
- c. Asset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai asset atau kewajiban lancar.
- d. Asset pajak kini harus dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah nettonya disajikan dalam neraca.
- e. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
- f. Asset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan hutang PPh 29.
- g. PPh final, Apabila nilai tercatat asset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai asset

atau kewajiban kena pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, sebab pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

- h. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka dan utang pajak.
- i. Akun PPh dibayar dimuka harus disajikan dari PPh final yang masih harus dibayar.

Dalam akuntansi pajak Penghasilan (PPh), laba dibedakan antara laba akuntansi (*accounting profit*), laba komersial dengan laba fiskal (*taxable profit*), atau Penghasilan Kena Pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal adalah laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan lebih ditujukan untuk menjadi dasar perhitungan PPh (IAI, 2004).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode.

Pajak terkini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Kewajiban pajak tangguhan (*defferered tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
- b. Sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa : perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi

(*settled*); atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Dasar pengenaan pajak (DPP) aktiva atau kewajiban adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam perhitungan laba fiskal. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat berupa :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah suatu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
4. Surat Ketetapan Nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan atau denda. Beban pajak (Pajak Penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan kini) dan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan tangguhan).

Pengakuan Aktiva Pajak Kini (*current Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Kini (*current tax Liabilities*) : Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aktiva.

Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Liabilities*) karena adanya Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*). Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak :

- a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau
- b. Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang:
 - 1) Bukan transaksi penggabungan usaha; dan
 - 2) Pada saat transaksi, tidak dipengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal.

Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba fiakal. Berikut ini disajikan contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan

kewajiban pajak tangguhan, misalnya : Penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi. Perbedaan temporernya adalah selisih antara nilai tercatat aktiva tetap dengan DPP-nya. DPP aktiva tetap adalah sebesar harga perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dalam perhitungan fiskal. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*). Sebaliknya, apabila penyusutan menurut pajak lebih lambat dibandingkan penyusutan menurut akuntansi maka timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal, sehingga timbul aktiva pajak tangguhan.

Perbedaan temporer juga timbul apabila :

- a. Biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang secara substansi merupakan suatu akuisi, dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal.
- b. Pada saat pengakuan awal, Dasar Penggunaan Pajak aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila merupakan suatu akuisi, dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal.

- c. Pada saat pengakuan awal, Dasar Pengenaan Pajak aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila perusahaan memperoleh bantuan atau sumbangan (yang bukan merupakan objek pajak) dalam bentuk aktiva.

Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aktiva atau kewajiban, sebagai contoh apabila sebagian atau seluruh harga pemerolehan suatu aktiva tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, tergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aktiva :

- a. Dalam suatu penggabungan usaha, perusahaan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill atau goodwill negatif.
- b. Apabila transaksi mempengaruhi laba akuntansi atau laba fiskal, perusahaan mengakui beban (penghasilan) pajak tangguhan pada laporan laba rugi;
- c. Apabila sifat transaksi bukan penggabungan usaha, tidak mempengaruhi laba atau laba fiskal maka perusahaan tidak diperkenankan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan pada pengakuan awal ataupun pada periode selanjutnya (*subsequent recognition*), karena penyesuaian nilai tercatat aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang transparan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk mengakui perubahan selanjutnya dalam

kewajiban atau aktiva pajak tangguhan yang belum diakui pada saat aktiva tersebut disusutkan.

Aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari :

- a. Goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
- b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak memperoleh baik laba akuntansi maupun laba fiskal.

Pengakuan suatu kewajiban mengandung makna bahwa nilai tercatat kewajiban akan diselesaikan pada masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya. Pada saat sumber daya tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, sebagian atau seluruh jumlah sumber daya tersebut mungkin dapat dikurangkan dari laba fiskal pada periode setelah pengakuan kewajiban. Dalam hal ini, perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat kewajiban dan DPP-nya. Oleh karena itu, timbul aktiva pajak tangguhan berupa penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Demikian pula halnya, apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah dari DPP-nya, maka selisihnya

merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa akan datang.

Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aktiva pajak tangguhan adalah biaya manfaat pensiun (*retirement benefit cost*). Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba akuntansi, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Perbedaan temporer adalah besar selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPP-nya (DPP-nya umum adalah nol). Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan aktiva pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar.

Penggunaan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada masa yang akan datang terjadi dalam bentuk pengurangan laba fiskal. Namun, manfaat ekonomi berupa pengurangan pembayaran pajak hanyalah dinikmati oleh perusahaan apabila perusahaan mempunyai laba fiskal dalam jumlah yang memadai sehingga dalam realisasi tersebut dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

Salah satu contoh timbulnya aktiva pajak tangguhan pada saat pengakuan awal suatu aktiva, adalah bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan akuntansi bantuan atau sumbangan tersebut yang berupa suatu aktiva

berwujud boleh disusutkan tetapi untuk tujuan fiskal tidak, aktiva tersebut tidak boleh disusutkan. Oleh karena itu nilai tercatat aktiva tersebut akan lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya sehingga timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perusahaan tidak mengakui aktiva pajak tangguhan dari bantuan atau sumbangan tersebut. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasikan.

Perlakuan akuntansi untuk pengaruh pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi pada tahun berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari : transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas saat periode yang sama atau periode yang berbeda penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi.

Pada umumnya, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam perhitungan penghasilan kena pajak (rugi pajak). Pajak tangguhan yang berasal dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Sebagai contoh adalah biaya pengembangan yang telah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 20 tentang Biaya Riser dan Pengembangan dan diamortisasi sebagai beban pada laporan laba rugi, namun untuk kepentingan pajak biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal.

Penyajian Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak : Aktiva pajak dan Kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan harus dibebankan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.

Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

I. Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, cara perhitungan laba dalam UU Pajak Penghasilan sama dengan yang dikenal dalam akuntansi. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara lain :

1. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan berbeda dengan definisi penghasilan menurut akuntansi.
2. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan dibebankan atas :
 - a. Penghasilan yang objek pajak yang dikenal pajak penghasilan bersifat tidak final.
 - b. Penghasilan yang objek pajak yang dikenal pajak penghasilan bersifat final, didalam akuntansi tidak dikenal perbedaan tersebut.
3. Didalam Undang-Undang pajak penghasilan biaya dibedakan atas :
 - a. Biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan (*deductable expenses costs*).

- b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan
(*non deductible expenses costs*).

Selain perbedaan tersebut, masih ada perbedaan antara akuntansi dan prinsip Undang-Undang pajak penghasilan. Markus dan Yujana (2000:714-715) mengatakan perbedaan-perbedaan dalam menghitung laba rugi menurut akuntansi dan Undang-Undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan saat pengakuan penghasilan dan biaya tidak selalu sama dengan saat pengakuan penghasilan dan biaya di dalam akuntansi.
2. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan prinsip perhitungan untung rugi penjualan harta.
3. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan, pencatatan besarnya penghasilan dan biaya harus berdasarkan “adap kebiasaan pedagang yang baik”, yaitu sesuai harga pasar yang wajar. Artinya Undang-Undang pajak penghasilan tidak mengizinkan jika ada wajib pajak yang melakukan rekayasa pencatatan penghasilan dan biaya, misalnya dengan cara mark up atau mark down atau melakukan transfer pricing dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka untuk memperkecil pajak penghasilan yang harus dibayar.
4. Karena perbedaan-perbedaan tersebut, pengertian kerugian usaha antara Undang-Undang pajak penghasilan dan akuntansi juga berbeda.

Perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam laporan keuangan biasa dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Perbedaan tersebut adalah perbedaan tetap yang sifatnya tetap, serta perbedaan sementara yang sifatnya sementara dan akan menghilang pada periode mendatang.

J. Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Menurut Munawir (2003:85): Perbedaan tetap adalah perbedaan akibat adanya pengakuan biaya dan pendapatan pada laporan komersial tetapi tidak pada laporan fiskal atau sebaliknya.

Perbedaan tersebut mengakibatkan laba yang diakui secara komersial berbeda dengan laba secara fiskal. Perbedaan tetap disebabkan karena menurut prinsip akuntansi, suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan suatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial, sedangkan menurut prinsip pajak suatu penerimaan tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan suatu pengeluaran tidak pernah diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan fiskal, atau sebaliknya.

Perbedaan ini timbul karena dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat biaya dan pendapatan yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan. Perbedaan ini bersifat tetap karena selisih laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang disebabkan perbedaan ini tidak pernah dapat dikompensasikan pada masa yang akan datang.

K. Perbedaan Temporer / Waktu (*Temporer / timing difference*)

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang timbul sebagai akibat perbedaan-perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Secara garis besarnya perbedaan ini dapat dibedakan atas empat variasi sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang menghitung penghasilan kena pajak dikurangkan lebih awal dari pada pengurangan dalam menentukan laba sebelum pajak untuk tahun komersial.

- b. Biaya-biaya yang menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat (kemudian) dari pada perhitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial.
- c. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat dan pada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial.
- d. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih awal dari pada menghitung pajak untuk tujuan komersial.

Perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pajak yang ditangguhkan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

1. Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan laba akuntansi sebelum pajak (*pretax accounting income*) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (*taxable income*).

2. Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan bisa terjadi apabila biaya atau kerugian diakui oleh akuntansi sebagai pengurang penghasilan pada tahun sesudah biaya atau kerugian itu diakui oleh pajak (akuntansi masih mencatatnya di neraca, tetapi pajak tidak lagi mencatatnya di neraca tetapi di laporan laba rugi). Dalam hal ini maka pada tahun ini pajak mengakui biaya lebih besar dari akuntansi sehingga penghasilan kena pajak akan menjadi lebih kecil dari pada laba akuntansi PSAK 46 mendefenisikan kewajiban pajak

tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer.

Contoh : Dalam Laporan Laba Rugi PT. ABC tahun 2001 terdapat beda waktu atas pembebanan penyusutan meja pajangan dan mesin kantor, pajak mengakui beban penyusutan lebih besar dan yang diakui akuntansi sehingga penghasilan kena pajak tahun 2001 lebih kecil dan laba akuntansi. Hal ini menimbulkan kewajiban pajak tangguhan.

Menurut akuntansi di tahun 2001 :

Beban penyusutan meja pajangan	=Rp. 6.000.000
Beban penyusutan beban kantor	<u>=Rp. 16.000.000</u>
Total	Rp. 22.000.000

Menurut pajak di tahun 2001 :

Beban penyusutan meja pajangan	=Rp. 7.500.000
Beban penyusutan mesin kantor	<u>=Rp. 20.000.000</u>
Total	Rp. 27.500.000

Perbedaan waktu/temporer =Rp. 5.500.000

Tarif PPh =Rp. 30%

Kewajiban pajak tangguhan Rp. 1.650.000

Adanya kewajiban pajak tangguhan tersebut menimbulkan beban pajak tangguhan.

Sehingga jurnalnya sebagai berikut :

Beban pajak tangguhan Rp 1.650.000

Kewajiban pajak tangguhan Rp 1.650.000

L. Rekonsiliasi Fiskal

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi. Koreksi ini dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dihasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu beda permanen (*permanent difference*) dan beda temporer (*temporary difference*). Kedua jenis koreksi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Beda Tetap

Beda tetap (*permanent difference*) disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban tertentu diakui pada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan komersial.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 menjelaskan adanya penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan objek pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak final.

- b. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang ditetapkan lain dalam peraturan menteri keuangan.
- c. Jumlah imbalan yang melebihi kewajaran yang dibagikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemberian gaji yang terlalu besar, pembayaran bunga atas pinjaman diatas bunga pasar dan sebagainya,
- d. Beban kontribusi sosial seperti sumbangan dan zakat.
- e. Sanksi perpajakan berupa denda dan bunga.
- f. Beban-beban yang berkaitan dengan jamuan.
- g. Pajak penghasilan.
- h. Lain-lain.

b. Beda Waktu (*temporary difference*)

Sedangkan beda waktu (*temporary difference*) disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.

- b. Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*) tidak boleh disusutkan oleh sisa penyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*).
- c. Penilaian persediaan, berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sementara dalam pelaporan komersial kita mengenal metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (LIFO), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dan lain-lain.
- d. Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berupa berwujud maupun yang tak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Peraturan perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Penggolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1.	Kelompok I	4 Tahun	25 %	50%
2.	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
3.	Kelompok III	16 Tahun	6,5%	12,5%
4.	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
5.	Bangunan Permanen	20 Tahun	5%	0
6.	Bangunan Nonpermanen	10 Tahun	10%	0

Sumber: Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 10

Tabel II.2
Masa Manfaat Dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

No	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1.	Kelompok I	4 Tahun	25 %	50%
2.	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
3.	Kelompok III	16 Tahun	6,5%	12,5%
4.	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

Sumber: Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 10

Perpajakan tidak mengakui beban yang berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun beban tersebut dibukukan pada laporan keuangan komersial.

M. Perhitungan Pajak Kini

Pajak kini adalah beban penghasilan perusahaan (beban) yang di hitung berdasarkan tarif efektif pajak penghasilan dikalikan dengan laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak penghasilan kini dibagi menjadi dua kelompok yaitu final non-final yang disajikan sebagai berikut:

Tarif pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Tarif Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Dan Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Sampai dengan rp. 50 Juta	10%
Diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	15%
Diatas Rp. 100 Juta	30%

Sumber: Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 12

Pada tahun 2002 PT X mengalami rugi fiskal sebesar Rp 1000.000.000. Pada tahun 2003, PT X dapat memperoleh laba fiskal sebesar Rp 1.515.666.667. Dengan demikian, terdapat rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sebesar Rp 1.000.000.000 pada tahun 2003. Laba kena pajak adalah sebesar Rp 515.666.667, maka beban pajak terkini akan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 5.000.000$$

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 15\% = \text{Rp. } 7.500.000$$

$$\text{Rp. } 415.666.667 \times 30\% = \text{Rp. } \underline{124.700.000} +$$

$$\text{Beban Pajak Kini} \qquad \qquad \text{Rp. } 137.200.000$$

Beban pajak kini akan menjadi pajak terutang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 29. Jurnal pembebanan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

(jurnal pencatatan-1)

$$\text{Beban pajak kini} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 137.200.000$$

$$\text{Hutang pajak penghasilan pasal 29} \qquad \qquad \text{Rp. } 137.200.000$$

Namun perlu diketahui, beban pajak yang ditangguhkan oleh perusahaan belum bersifat final apabila PT X memiliki saldo pajak dibayar dimuka yang sifatnya non-final atau dapat dikreditkan. Beban pajak dibayar dimuka yang sifatnya non-final yang telah dibayar oleh PT X adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan atas setiap barang impor yang dikenakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai atau bank devisa. Barang impor yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan sebesar 2,5%, sedangkan barang impor yang tidak menggunakan angka pengenal impor akan dikenakan sebesar 7%.

Jika selama tahun 2004 PT X ternyata melakukan impor atas bahan baku dengan nilai impor sebesar US\$ 1.000.000 (kurs pajak, US\$ 1 = Rp 8.500), dan barang tersebut menggunakan angka pengenal impor maka jurnal pencatatan pembelian dan pajak penghasilan pasal 22 (2,5%) adalah sebagai berikut:

(jurnal pencatatan-2)

Persediaan bahan baku	Rp. 8.500.000.000
-----------------------	-------------------

Pajak penghasilan pasal 22 Dibayar dimuka	Rp. 212.500.000
---	-----------------

Kas

Rp.8.712.500.000

Pencatatan pembelian bahan baku dan pajak penghasilan pasal 22 dibayar dimuka
(Rp. 8.500.000.000 x 2,5%).

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 23, deviden, bunga, royalty, hadiah penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, konsultan dan jasa lain dikenakan pajak penghasilan tidak final sebesar 15%. Jika selama tahun 2004 PT X juga memberikan jasa konsultasi teknik kepada pelanggannya dengan fee sebesar Rp. 35.000.000, maka pendapatan tersebut wajib dikenakan pajak penghasilan non-final sebesar 15%.

3. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan yang berasal dari luar negeri dan bersifat non-final. Tarif yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 24 adalah sama dengan tarif yang dipakai untuk menghitung pajak penghasilan badan.

Jika PT X menerima penghasilan bersih dari unit bisnisnya yang berada di jepang sebesar Rp. 30.000.000 maka akan dijurnal sebagai berikut:

(jurnal pencatatan-3)

Kas	Rp. 27.000.000
Pajak penghasilan pasal 24 dibayar dimuka	Rp. 3.000.000
Pendapatan	Rp. 30.000.000

N. Pajak Dalam Islam

1. Defenisi Pajak

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyra atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya : “pungutan yang ditarik

dari rakyat oleh para penarik pajak” atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

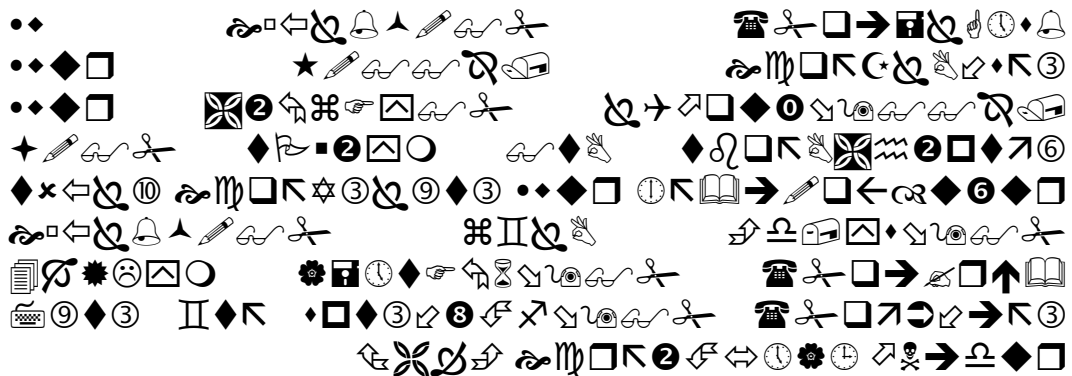
Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah “suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun dalam sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak :

- a) Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini adalah Negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, elit penguasa.
- b) Pajak dengan konsep “kontra-prestasi” (Jizyah: Al-Qur’an) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara dengan Pajak Jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.
- c) Pajak dengan konsep etik dan ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya. (Mas’ud, 2007 : 71)

Sedangkan dalam bukunya Abdullah (2007:220) yang dikutip dari tafsir Al-Manar karangan M. Rasyid Ridha mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX Hijriah, pada masa nabi Muhammad SAW pajak

baru diwajibkan pada orang-orang kafir Dzimnya dan Harby. Yang dilatarbelakangi surat At-Taubah (9:29) yaitu:



“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan meraka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

2. Perbedaan Pajak dengan Zakat

Imam Abu Ja’far Atr-Thahawi rahimahumullah dalam kitabnya Syarh Ma’ani Al-Atsar (2/30-31), berkata bahwa Al-Usyr yang telah dihapus kewajibanya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliah”. Kemudian beliau melanjutkan:”...hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat...”.

Perbedaan lain yang sangat antara pajak dengan zakat diantaranya:

- a. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah

sampai nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa disuatu tempat.

- b. Zakat berlaku bagi kaum muslim saja, hal ini lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir, karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal ditanah kekuasaan kaum muslimin.
- c. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin dan dikembalikan/diberikan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Zakat adalah salah satu bentuk syari'at islam yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasaannya.

Diantara pemasuk sumber Negara yang pernah terjadi dizaman Rasulullah SAW adalah :

- 1. Zakat, yaitu kewajiban setiap muslim yang mempunyai harta hingga mencapai nisabnya. Disamping pemilik harta berhak

mengeluarkan sendiri zakatnya dan diberikan kepada yang membutuhkan, penguasa juga mempunyai hak untuk menarik zakat dari kaum muslim yang memiliki harta, lebih-lebih apabila mereka menolaknya, kemudian zakat itu dikumpulkan para petugas zakat (amil) yang ditugaskan oleh pemimpinnya, dan dibagikan sesungguhnya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-taubah: kita lihat adanya amil-amil zakat yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslim yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.

2. Harta warisan yang tidak habis terbagi. Ada dua pendapat yang masyhur dikalangan faraidh. Pendapat yang pertama, harus dikembalikan kepada masing-masing disesuaikan dengan kedekatan mereka kepada mayit, kecuali salah satu dari istri atau pendapat kedua mengatakan, semua harta yang tidak terbagi/kelebihan, maka dilakukan kebaitul mal/kas Negara. Walaupun demikian, suatu ketika harta yang kelebihan itu dikembalikan kepada masing-masing ahli waris, semisalnya ada seorang yang meninggalkan warisannya seorang janda saja maka janda tersebut mendapat haknya $\frac{1}{6}$ dan sisanya mau tidak mau dikembalikan ke baitul mal.
3. Jizyah, adalah harta/ upeti yang diambil dari orang-orang kafir yang diizinkan di Negeri islam sebagai jaminan keamanannya.

4. Ghainimah dan fai'. Ghainimah adalah harta orang kafir (al-harbi) yang dikuasai muslimin dengan adanya peperangan. Sedangkan fai' adalah harta orang kafir yang ditinggalkan dan dikuasai oleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan.
5. Shadaqah tathawaf, yaitu rakyat menyumbang dengan suka rela kepada Negara digunakan untuk kepentingan bersama.
6. Hasil tambang dan semisalnya. (Almanhaj.or.id).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Catur Sentosa Adiprana merupakan suatu perusahaan distributor yang bergerak dibidang penjualan barang-barang bangunan. PT. Catur Sentosa Adiprana didirikan pada tanggal 2 September 1999, yang di pimpin oleh Bapak Sunarto Usman. Pada awalnya modal awal PT. Catur Sentosa Adiprana Sentosa ini sebesar Rp. 608.525.662,00. Pada saat itu perusahaan berkedudukan di Jalan Nangka No. 126 GH Pekanbaru.

Karena makin berkembangnya kegiatan usaha perusahaan ini maka pada tahun 2002 PT. Catur Sentosa Adiprana pindah ke Jalan Sultan Syarif Kasim No. 72 Pekanbaru dan memiliki gudang usaha didaerah Palas Pekanbaru. Dengan jumlah karyawan lebih kurang 15 orang.

Disamping meningkatkan kinerja dan kualitas barang dari perusahaan ini untuk mendistributorkan barang-barang bangunan dengan mutu yang baik, maka akan diharapkan minat masyarakat untuk membeli atau memesan barang dari PT. Catur Sentosa Adiprana sehingga dengan demikian akan mendorong pula bagi perusahaan untuk berkembang pada masa-masa berikutnya. Maksud dan tujuan perusahaan didirikan adalah :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Mensejahterakan para karyawan
- c. Pengembangan usaha dibidang barang-barang bangunan

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam setiap perusahaan selalu ada struktur organisasi yang bentuknya berbeda-beda menurut jenis kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut, dengan banyaknya jenis pekerjaan yang harus dilakukan hendaknya ada perubahan dan penyesuaian dalam struktur organisasinya.

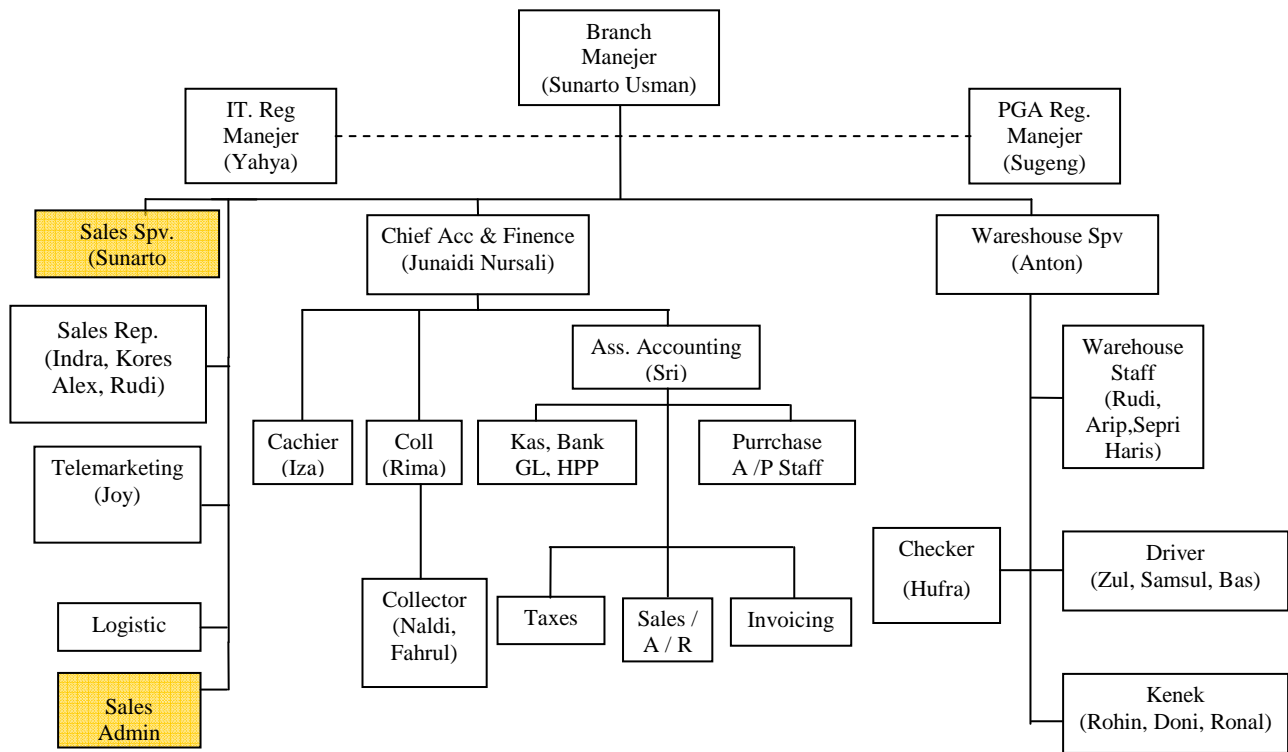
Keleluasaan dalam melakukan tugas akan berhasil bila diimbangi dengan tanggungjawab karena ia mempunyai tugas-tugas yang harus dilakukan, akan tetapi pertanggungjawaban terakhir secara keseluruhan didalam organisasi terletak ditangan pimpinan yang tertinggi. Terbentuknya organisasi pada suatu perusahaan adalah dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang paling efektif dan efisien.

Struktur organisasi suatu perusahaan harus dibentuk mempertimbangkan strategi perusahaan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang dibentuk seharusnya yang bersifat fleksibel, sehingga dapat diubah atau diperbaharui tanpa harus mengubah struktur organisasi tersebut secara total.

Dengan adanya struktur perusahaan ini, maka setiap personil baik yang bekerja sebagai unsur dari pimpinan perusahaan maupun staf yang bekerja dibagian lapangan dapat diberikan suatu gambaran yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu dan diawasi setiap bagian yang dipimpin serta kemana pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan, maka akan semakin kompleks pula struktur dari suatu perusahaan. Struktur organisasi dari perusahaan ini didasarkan pada pengelompokan beberapa fungsi yang erat kaitanya dengan tugas-tugas yang dijadikan oleh masing-masing bagian.

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi adalah faktor yang sangat penting. Karena tanpa adanya struktur organisasi maka semakin tujuan dari perusahaan tidak mungkin tercapai, karena semakin besar suatu perusahaan maka semakin kompleks pula organisasi didalamnya.

Jika diperhatikan struktur organisasi yang telah disusun oleh perusahaan ini, dalam kegiatan usahanya maka dapat dilihat bentuk dari struktur organisasi perusahaan tersebut adalah bentuk garis dan staf, yang mana wewenang tertinggi dipegang oleh atasan atau yang mempunyai perusahaan yang bawahannya juga mempunyai bawahan dan seksi-seksi.



Adapun pembagian tugas manajemen PT. Catur Sentosa Adiprana adalah sebagai berikut :

1. Branch Manajer

Tugasnya Menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk target perusahaan. Kemudian mengajukan usulan dan revisi Rancangan dan Anggaran Keuangan Perusahaan. Selanjutnya melaksanakan rencana kerja dan anggaran bulanan yang telah disetujui dan disahkan sebelumnya.

2. Bagian Penjualan

Tugasnya melaksanakan kegiatan penjualan sesuai dengan rencana kinerja, kemudian membantu pimpinan perusahaan dalam kegiatan penjualan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tugas selanjutnya memelihara dan menjaga harta kekayaan perusahaan dibidang penjualan. Adapun tugas-tugas stafnya diantaranya adalah :

- a. Telemarketing tugasnya menerima pesanan dan membuat order form kemudian meminta persetujuan melalui sales supervisor.
- b. Logistic bertugas menerima *order form* asli dari sales admin dan memeriksa kelengkapan otorisasi pada *order form*.
- c. Sales Admin tugasnya adalah menerima *order form* asli dari telemarketing.

3. Bagian Accounting

Tugasnya membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional perusahaan, baik yang berhubungan dengan

pengeluaran dan pemasukan perusahaan khususnya dibidang accounting dan financial perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas sebagian besar para stafnya yaitu :

- a. *Cachier* tugasnya adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, melakukan pembayaran gaji setiap bulannya pada karyawan perusahaan.
- b. *Collection* Admin tugasnya menerima invoice asli, membuat billing dan daftar penagihan untuk diserahkan ke collector.
- c. *Collektor* tugasnya menagih ke *costumer* sesuai dengan daftar tagih yang telah sesuai dengan daftar tagih.

4. Bagian Administrasi.

a. Administrasi Perkantoran

Bertugas dalam hal surat menyurat atau menerima pesanan dari pelanggan, mengurus jamsostek, laporan bulanan ke Depnaker dan keluar masuknya tenaga kerja yang diterima oleh PT. Catur Sentosa Adiprana.

b. Administrasi Penjualan

Tugasnya mencatat penjualan yang ada pada perusahaan.

c. Taxes

Tugasnya membayar pajak tiap tahunnya.

d. *Invoicing*

Tugasnya adalah membuat *delivery order* (DO) kemudian diserahkan ke collection admin.

5. Bagian Gudang

Bertugas dalam menyediakan dan mengirim barang-barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Membuat laporan persediaan setiap akhir tahun. Membantu kegiatan bagian penjualan dalam persiapan barang-barang yang akan dikirim maupun dijual. Mengirim kembali barang-barang yang mengalami kerusakan. Melakukan stok minimal sekali dalam sebulan.

C. Aktivitas Perusahaan

PT. Catur Sentosa Adiprana melakukan distributor barang-barang bangunan kepada langganannya terutama kepada toko-toko bahan-bahan bangunan yang ada di Pekanbaru. Barang-barang bangunan yang dijual di antaranya adalah :

- a. Cat bermerk Globe, Mowilex dan Farco
- b. Keramik bermerk Arwana
- c. Pipa merk Unggul
- d. Kuas merk Aceolvil
- e. Kunci merk Yale
- f. Aksesoris kamar mandi merk Homan

Seiring dengan perkembangan perusahaan yang merupakan sumber utama perusahaan adalah dibidang penjualan barang-barang bangunan. Oleh karena itu

perusahaan terus mengupayakan kelanjutannya yang telah sesuai dengan rencana dan pengembangan perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Laba Rugi Menurut Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang disajikan oleh perusahaan yang berfungsi mengukur kinerja keuangan selama suatu periode tertentu. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan adanya pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang terkait. Pada setiap akhir periode akuntansi, perusahaan dituntut untuk membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi mengiktisarkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang diperhitungkan selama jangka waktu tertentu dalam periode operasi perusahaan. Adapun elemen-elemen yang termasuk dalam perhitungan laba rugi yang disusun oleh perusahaan pada Tahun 2007 ini secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Penjualan. Merupakan penjualan PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru dari usaha distributor barang-barang bangunan sebesar Rp. 1.805.800.000,00
- b. Harga Pokok Penjualan. Merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan usaha perusahaan di bidang distributor. Biayanya sebesar Rp. 1.407.568.521,00
- c. Beban Pengangkutan sebesar Rp. 30.075.000,00
- d. Beban Gaji Karyawan Rp. 54.500.000,00
- e. Beban Administrasi Kantor Rp. 19.467.800,00

- f. Promosi dan Bonus Rp. 5.325.800,00
- g. Beban Perjalanan Dinas Rp. 16.350.000,00
- h. Beban Listrik RP. 8.985.600,00
- i. Alat Tulis dan Cetakan Rp. 10.435.854,00
- j. Beban Penyusutan Rp. 66.176.000,00
- k. Biaya Sumbangan sebesar Rp. 3.575.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka untuk membantu kegiatan masyarakat sekitar perusahaan untuk merayakan hari kemerdekaan dan hari besar lainnya, sumbangan untuk lembaga amal lainnya.
- l. Beban Telpon dan HP Rp. 6.500.000,00
- m. Beban Entertainment Rp. 11.000.000,00
- n. Beban Non Cash Rp. 11.575.200,00
- o. Beban Perbaikan dan Pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan ini gunanya untuk memperbaiki aktiva tetap perusahaan sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 17.585.500,00
- p. Beban Transportasi sebesar Rp. 19.750.000,00
- q. Beban Karyawan Rp. 10.452.000,00
- r. Biaya Lain-lain sebesar Rp. 5.850.000,00

Dalam laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan tersebut haruslah berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 dilaporkan sebagai berikut:

PT. Catur Sentosa Adiprana
Perhitungan Laba Rugi
Per 31 Desember 2007

Penjualan	1,805,800,000.00
Harga Pokok Penjualan	1,407,568,521.00
Laba Kotor	389,231,479.00

BEBAN-BEBAN

Beban Operasi	
Beban Pengangkutan	30,075,000.00
Beban Gaji Karyawan	54,500,000.00
Beban Administrasi Kantor	19,467,800.00
Promosi dan Bonus	5,325,800.00
Beban Perjalanan Dinas	16,350,000.00
Beban Listrik	8,985,600.00
Alat Tulis dan Cetakan	10,435,854.00
Beban Penyusutan	66,176,000.00
Beban Sumbangan	3,575,000.00
Beban Telpon dan HP	6,500,000.00
Beban Entertainment	11,000,000.00
Beban Non Cash	11,575,200.00
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	17,585,500.00
Beban Transportasi	19,750,000.00
Beban Karyawan	10,452,000.00
Beban Lain-lain	5,850,000.00
Jumlah Beban Operasi	297,603,754.00
Laba Operasi	100,627,725.00

Pendapatan dan Beban Diluar Operasi	3,848,662.00
Laba Sebelum Pajak	104,476,387.00

PPh Terhutang

10 % x Rp. 50000000	=	5,000,000.00
15 % x Rp. 50000000	=	7,500,000.00
30 % x Rp. 4476387	=	1,342,916,10
Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang		13,842,916,10

LABA BERSIH SETELAH PAJAK

90,633,470,10

Sumber : PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru

Dari Laba komersial yang disusun oleh perusahaan maka besarnya laba sebelum pajak yang dihitung oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 104.476.387,00. Sehingga pajak penghasilan yang dihitung adalah sebesar :

10 %	x	50.000.000,00	=	5.000.000,00
15 %	x	50.000.000,00	=	7.500.000,00
30 %	x	4.476.387,00	=	1.342.916,10
Jumlah Pajak Penghasilan				= 13.842.916,10

Untuk tahun 2007, pajak penghasilan yang dihitung perusahaan adalah sebesar Rp. 13.842.916,10

B. Perhitungan Laba Rugi Menurut Undang-Undang Perpajakan

Pada bab I telah dijelaskan bahwa perhitungan laba yang disusun oleh perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak sesuai dengan perhitungan laba rugi menurut Undang-Undang Perpajakan. Perhitungan laba berdasarkan komersial akuntansi disebut sebagai laba akuntansi (laba komersial), sedangkan perhitungan laba menurut perpajakan disebut laba fiskal.

Agar laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, maka diperlukan adanya koreksi atas beberapa elemen yang ada didalam laporan laba rugi yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal, koreksi ini diperlukan karena terdapat perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-Undang Perpajakan.

Untuk memperlihatkan perbedaan yang ada, maka penulis akan mencoba mengeluarkan elemen-elemen pada perhitungan laba perusahaan yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi fiskal sehingga harus dikoreksi yaitu :

1. Beda Tetap

- a. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 16.350.000,-. Biaya perjalanan dinas PT. Catur Sentosa Adiprana yang didalamnya termasuk biaya makan dan minum yang menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf b tidak dapat diakui sebagai biaya perusahaan dan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- b. Biaya sumbangan sebesar Rp. 3.575.000,-. Biaya sumbangan yang diberikan ini tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan maka dalam Undang-Undang perpajakan biaya ini tidak boleh diperlakukan sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, bantuan atau sumbangan dan harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability* dan *deductability*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang

Pajak Penghasilan, bagi Wajib Pajak sebagai pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibah tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- c. Biaya Entertainment yang dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp.11.000.000,-. Pembebanan biaya entertainment sesuai dengan SE Dirjen Pajak No. 27 Tahun 1986 pada prinsipnya dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Disamping itu, untuk dapat dibebankan sebagai biaya wajib pajak harus melampirkan pada Surat Pembaritahuan Tahunan daftar nominative yang berisikan :

- a. Nomor urut, tanggal, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- b. Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai nomor urut diatas berisikan : nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha, yang diberikan entertainment dan sejenisnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf keuangan ternyata biaya entertainment tersebut tidak ada dilampirkan daftar nominatifnya sebagaimana yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, biaya entertainment tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2. Beda Waktu

Perbedaan waktu mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan beban antara satu tahun pajak ketahun pajak lainnya. Perbedaan waktu tersebut ditampung dalam pos pajak penghasilan yang ditangguhkan dan dialokasikan pada beban pajak penghasilan untuk tahun-tahun berikutnya.

Tabel IV.1 Perhitungan Penyusutan Berdasarkan Pajak

No	JENIS AKTIVA	% PENY	THN PER OLEHAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN 31-12-2007	Akumulasi PENYUSUTAN 31-12-2007	NILAI BUKU
I	BANGUNAN						
1	Bangunan Kantor	5%	2000	235,800,000.00	11,790,000.00	70,740,000.00	165,060,000.00
				235,800,000.00	11,790,000.00	70,740,000.00	165,060,000.00
II	KENDARAAN						
1	Mobil kijang	12,5%	2000	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-
5	Sepeda Motor	12,5%	2000	11,500,000.00	-	9,000,000.00	-
6	Mobil Nissan Terano	12,5%	2002	232,500,000.00	29,375,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00
7	Sepeda Motor	25%	2003	16,500,000.00	4,125,000.00	12,375,000.00	4,125,000.00
				355,500,000.00	33,500,000.00	233,875,000.00	121,625,000.00
IV	PERALATAN KANTOR						
1	Komputer	12,5%	1998	13,500,000.00	-	13,500,000.00	-
2	AC	12,5%	1998	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-
3	Electric Installment	12,5%	1999	13,050,000.00	-	13,050,000.00	-
4	Meja Kursi kantor	12,5%	1999	17,580,000.00	-	17,580,000.00	-
5	Kursi Tamu	12,5%	1999	12,250,000.00	-	12,250,000.00	-
6	Lemari	12,5%	2000	4,086,000.00	-	4,086,000.00	-
7	Brankas	12,5%	2000	1,850,000.00	231,250.00	925,000.00	925,000.00
8	Mesin Tik	25%	2002	750,000.00	187,500.00	750,000.00	-
9	Kalkulator	25%	2002	250,000.00	62,500.00	250,000.00	-
10	Komputer + Printer	12,5%	2003	17,580,000.00	2,197,500.00	6,592,500.00	10,987,500.00
				95,396,000.00	2,687,750.00	83,483,500.00	11,912,500.00
	Jumlah			686,696,000.00	47,968,750.00	388,098,500.00	226,262,000.00

Sumber : data olahan

Berikut perhitungannya :

Menurut akuntansi komersil tahun 2007 :

Beban penyusutan bangunan kantor	$5\% \times \text{Rp. } 235,800,000.00 = \text{Rp. } 11,790,000,-$
Beban penyusutan mobil nissan terano	$20\% \times \text{Rp. } 235,000,000.00 = \text{Rp. } 47,000,000,-$
Beban penyusutan sepeda motor	$20\% \times \text{Rp. } 16,500,000.00 = \text{Rp. } 3,300,000,-$
Beban penyusutan brankas	$20\% \times \text{Rp. } 1,850,000.00 = \text{Rp. } 370,000,-$
Beban penyusutan mesin tik	$20\% \times \text{Rp. } 750,000.00 = \text{Rp. } 150,000,-$

Beban penyusutan kalkulator	20% x Rp. 250,000.00	= Rp. 50,000,-
Beban penyusutan komputer + printer	20% x Rp. 17,580,000.00	= Rp. 3,516,000,-
Total		= Rp. 66.176.000,-

Menurut pajak fiskal tahun 2007 :

Beban penyusutan bangunan kantor	5% x Rp. 235,800,000.00	=Rp. 11,790,000,-
Beban penyusutan mobil Nissan terano	12,5% x Rp.235,000,000.00	=Rp. 29,375,000,-
Beban penyusutan sepeda motor	25% x Rp. 16,500,000.00	= Rp. 4,125,000,-
Beban penyusutan brankas	12,5% x Rp. 1,850,000.00	= Rp. 231.250,-
Beban penyusutan mesin tik	25% x Rp. 750,000.00	= Rp. 187.500,-
Beban penyusutan kalkulator	25% x Rp. 250,000.00	= Rp. 62.500,-
Beban penyusutan komputer + printer	12,5% x Rp. 17,580,000.00	= Rp. 2.197.500,-
Total		= Rp. 47.968.750,-
Perbedaan waktu / temporer		= Rp. 18.207.250,-
Tarif PPh		30 %
Kewajiban pajak tangguhan		= Rp. 5.462.175,-

Adanya kewajiban pajak tangguhan tersebut menimbulkan beban pajak tangguhan.

Sehingga jurnalnya sebagai berikut :

Beban pajak tangguhan	Rp5.462.175,-
Kewajiban pajak tangguhan	Rp. 5.462.175,-

Dalam hal ini PT. Catur Sentosa Adiprana memiliki perbedaan waktu sebesar Rp. 18.207.250,- perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan tarif penyusutan dimana perusahaan menghitung penyusutan berdasarkan metode garis lurus berdasarkan harga perolehan dibagi umur ekonomisnya, sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus dengan mengelompokkan aktiva sesuai dengan golongan masing-masing. Jadi, meskipun menggunakan metode yang sama, tetapi tarif yang digunakan untuk aktiva yang bersangkutan berbeda. Dengan demikian perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi sebelum dilakukannya perhitungan laba kena pajak yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.2 PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi
Per 31 desember 2007

Keterangan	Lap.komersial	Koreksi Fiskal	Lap.Fiskal
Penjualan	1.805.800.000,00	-	1.805.800.000,00
HPP	1.407.568.521,00	-	1.407.568.521,00
Laba kotor	389.231.479,00	-	389.231.479,00
BEBAN OPERASI			
Beban Pengangkutan	30.075.000,00	-	30.075.000,00
Beban Gaji Karyawan	54.500.000,00	-	54.500.000,00
Beban Administrasi Kantor	19.467.800,00	-	19.467.800,00
Promosi dan Bonus	5.325.800,00	-	5.325.800,00
Beban Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.350.000,00	-
Beban Listrik	8.985.600,00	-	8.985.600,00
Alat Tulis dan Cetakan	10.435.854,00	-	10.435.854,00
Beban Penyusutan	66.176.000,00	-	66.176.000,00
Beban Sumbangan	3.575.000,00	3.575.000,00	-
Beban Telpn dan Hp	6.500.000,00	-	6.500.000,00
Beban Entertainment	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Beban Non Cash	11.575.200,00	-	11.575.200,00
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	17.585.500,00	-	17.585.500,00
Beban Transportasi	19.750.000,00	-	19.750.000,00
Beban Karyawan	10.452.000,00	-	10.452.000,00
Beban Lain-lain	5.850.000,00	-	5.850.000,00
Jumlah Beban Operasi	297.603.754,00	-	266.678.754,00
Laba Operasi	100.627.725,00		131.552.725,00
Pendapatan diluar Operasi			
Pendapatan dan beban lainnya	3.848.662,00	-	3.848.662,00
Selisih Pendapatan dan beban diluar Operasi			
Laba Sebelum Pajak	104.476.387,00	-	135.401.387,00
PPH terhutang	13.842.916,1	-	23.120.416,1
Laba Bersih Setelah Pajak	90.633.470,9	-	112.280.970,9

Sumber : Hasil Olahan

Rincian biaya-biaya yang dimasukkan dalam penyesuaian fiskal positif adalah:

- Biaya perjalanan dinas	Rp 16.350.000,-,-
- Biaya entertainment	Rp. 11.000.000,-
- Biaya sumbangan	Rp. 3.575.000,-
Total	Rp. 30.925.000,-

Setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang seharusnya tidak dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut diatas. Dimana perusahaan menghitung laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 90.633.470,- sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal maka laba bersih setelah pajak adalah sebesar Rp. 112.280.970,-

C. Perbedaan Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Dengan PSAK No. 46

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru maka diketahui laba menurut perusahaan sebesar Rp. 104.476.387,- adalah laba bruto yang telah dikurangi dengan biaya perjalanan dinas Rp. 16.350.000,- biaya entertainment Rp. 11.000.000,- biaya sumbangan Rp. 3.575.000,- yang tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan untuk dikurangi dari laba perusahaan.

Berdasarkan hasil dari laporan koreksi fiskal terjadi peningkatan laba sebelum pajak dari Rp.104.476.387,- (laporan komersial) menjadi Rp. 135.401.387,- setelah melakukan koreksi fiskal. Dengan berkurangnya biaya operasional yang semula sebesar Rp. 297.603.754,0 menjadi Rp. 266.678.754,- . Maka terjadi pulalah peningkatan jumlah beban pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu dari Rp. 13.842.916,- menjadi Rp. 23.120.416,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Laba sebelum pajak penghasilan fiskal	Rp. 135.401.387,-
PPh badan tahun 2007 fiskal	Rp. 23.120.416,-
Laba setelah pajak fiskal	Rp 112.280.970,-

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat selisih PPh badan menurut perusahaan dengan menurut perpajakan sebesar Rp 23.120.416,00 – Rp. 13.842.916,00 = Rp.9.277.500,00 yang mungkin dikenakan denda dan sanksi atas kesalahan tersebut apabila ada pemeriksaan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat kurang bayar.

Laba kena pajak yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan laba kena pajak setelah diadakan koreksi fiskal negatif. Standar akuntansi keuangan (SAK) memperkenalkan perusahaan untuk menggunakan teknik alokasi pajak jika terjadi perbedaan-perbedaan yang bersifat sementara (*timing difference*). Selisih perhitungan pajak penghasilan akan ditampung dalam pos pajak penghasilan ditangguhkan (*deffered*

tax). Perbedaan yang terjadi pada PT. Catur sentosa adiprana bersifat tetap (*permanent difference*) diantaranya biaya perjalanan dinas, biaya entertainment, biaya sumbangan.

Berdasarkan untaian diatas yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa dalam melaksanakan akuntansi pajak penghasilan PT. Catur Sentosa Adiprana belum melakukannya sesuai dengan ketentuan atau peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dalam penyusutan laporan laba rugi yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan antara catatan akuntansinya dengan menurut Undang-Undang Perpajakan. Sehingga bilamana perusahaan memperoleh laba maka akan terdapat perbedaan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan antara besarnya laba menurut catatan akuntansinya dengan laba kena pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan jumlah pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebesar Rp. 23.120.416,- atau berbeda sebesar Rp. 9.277.500,- dari jumlah pajak yang dihitung menurut laporan keuangan komersil.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dan saran dari uraian dan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan ini menghitung pajak penghasilan berdasarkan laporan keuangan akuntansi. Sehingga dari laporan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dimana dalam laporan pajak atau laporan laba fiskalnya, biaya-biaya tersebut tidak dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto.
 2. Permasalahan yang ditemui dalam perusahaan ini adalah dalam laporan perhitungan pajak penghasilan per 31 Desember 2007, perusahaan ini memasukkan biaya sumbangan Rp. 4.508.500,- biaya entertainment Rp. 9.308.660,- dan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 36.325.200,- sebagai pengurang penghasilan bruto yang dalam penghasilan dan biaya tersebut terdapat beda tetap.
 3. Perusahaan ini dalam menghitung beban penyusutan aktiva tetapnya menggunakan tarif penyusutan garis lurus namun di dalam daftar aktiva tetap perusahaan tidak ada mengelompokkan jenis aktiva sesuai ketentuan pajak. Semua aktiva tetap disusutkan 20 % kecuali bangunan disusutkan 5 %.
- Perbedaan

tarif penyusutan ini mengakibatkan beda waktu sehingga kesalahan dalam perhitungan besarnya beban penyusutan untuk tahun berjalan menurut ketentuan pajak.

4. Menurut akuntansi beban penyusutan yang dihitung oleh perusahaan adalah sebesar Rp.66.176.000,- sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan beban penyusutannya adalah sebesar Rp. 47.968750,- oleh sebab itu menimbulkan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 5.642.175,-
5. Perusahaan ini menghitung laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 90.633.470,- sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto laba bersih setelah pajaknya adalah sebesar Rp. 112.280.970,-

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut :

1. PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru sebaiknya membuat laporan keuangan (laporan laba rugi) yaitu laporan perhitungan Laba Fiskal (laporan perhitungan laba yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan) dan laporan perhitungan laba komersial (laporan perhitungan laba yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan). Dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK sebaiknya PT. Catur Sentosa Adiprana mengalokasikan beban pajak perusahaan kedalam pajak kini dan pajak tangguhan sehingga akuntansi pajak penghasilan yang diterapkan perusahaan menjadi benar.

2. Sebaiknya PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru lebih memahami peraturan perpajakan dengan mengikuti pelatihan perpajakan sehingga perusahaan lebih memahami biaya-biaya yang dapat atau pun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dalam menghitung pajak penghasilan perusahaan. sehingga kelak perusahaan tidak dirugikan karena hal tersebut, apabila ada pemeriksaan dari kantor pelayanan pajak.
3. PT. Catur Sentosa Adiprana Pekanbaru ini sebaiknya menerapkan Prinsip Standar Keuangan Nomor 46 untuk mengoreksi perbedaan temporer.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya perusahaan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan format yang ditentukan dalam PSAK No.1
5. Mengingat bahwa peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perekonomian, diharapkan perusahaan dan pihak-pihak perusahaan terus mengikuti perkembangan tersebut dengan cara mencari informasi ke Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syafyan Raji, 2007, 250 *Aktualita Masalah Agama*, Jilid I Penerbit Pustaka Al Riyald, Jakarta
- Bohari, 2001, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, R.Santoso,1999. *Pengantar Ilmu Pajak*. Penerbit PT. Eresco, Bandung.
- Hernanto, 2003, *Akuntansi Perpajakan*, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Kartasasmitha, Husein, 2001. *Perpajakan*. Buku ke Dua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana, 2001, *Penunjuk Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Penerbit, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Markus, Muda, 2002, *Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Markus, Muda, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Graha Pustaka Utama, Jakarta.
- Mas'ud, Masdar Farid, 2007, *Pajak Dalam Islam*, [www. Islamemansipasitoris. Com](http://www.Islamemansipasitoris.Com)
- Mirasi P. Purba dan Anderson, 2005, *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Munawir, 2003. *Perpajakan*. Edisi ke Lima, Liberty, Yogyakarta.
- Prabowo, Yusdianto, 2001, *Pengetahuan Praktis Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Purba, Marisi P. dan Andreas, 2005, *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku Satu, penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo dan Ilyas Wirawan, 2003,. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Departemen Keuangan, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007*, [www. Laporpajak. Com](http://www.Laporkajak.Com)

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, *Perpajakan*, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok I
- Lampiran 2 : Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok II
- Lampiran 3 : Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok III
- Lampiran 4 : Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok IV

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tarif Penyusutan Kelompok Harta berwujud.....	53
Tanel II.2	Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud.....	54
Tabel III.3	Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak dan Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	55
Tabel IV.1	Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Per 31 Des 2007	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.I	Struktur Organisasi PT. Catur Sentosa Adiprana Pakanbaru	66
--------------	--	----

Lampiran 1 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam kelompok I
Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KM.03/2002

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja bangku, kursi, almari dan sejenis yang bukan dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplicator, mesin fotocopy, Accounting Mechine c. Perlengkapan lainnya seperti amplifer tape / Cassete, video, Recorder, televise, dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak e. Alat perlengkapan khusus f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman.
2	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	Alat yang digerakkan dengan bukan mesin
3	Industri Makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindahkan seperti Huller, Pemecah kulit, penyosong, pengering, Pallet dan sebagainya
4	Perhubungan Pergudangan dan Komunikasi	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai Angkutan umum
5	Industri Semi Konduktor	Flash memory tester, writer machine, biporar test system, Eleiomination (PE8-1), pose checker.

Sumber : Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2000, hal 258-259

Lampiran 2 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II
Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KM.03/2002

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya b. Komputer, printer, scanner dan sejenisnya c. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya d. Container dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, dan penebar benih. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan/memproduksi bahan/ barang pertanian kehutanan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras dan gandum

		<p>c. Mesin menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman</p> <p>d. Mesin menghasilkan / memproduksi bahan makanan.</p>
4	Mesin Industri	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin-ringan misalnya mesin jahit, pompa air
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, <i>dump truck, crane bulldozer</i>
7	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus, tertentu termasuk kapal penangkap pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya</p> <p>d. Perahu layar atau tanpa motor</p>
8	Telekomunikasi	Perangkat pesawat telpon, pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerima radio telpon
9	Industri semi Konduktor	Auto frame loader automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut

		<p>machine dicer, diebonder, die sear tets, dynamic burning system oven, dynamic testhandler, eliminator (PGE-01), full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser maker (FUMA-01) logic Test system, molding, mounter, MPS automatic MPS manual, OS tester manual, pass oven, pose chekcker, reform machine, tiebar cut press, trimming forming machine, wire bonder, wire full tester.</p>
--	--	--

Sumber : Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2000, hal 260-262

Lampiran 3 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III
Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KM.03/2002

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican
2	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, serat-serat beatan, wol, dan bulu hewan lainnya, lena mari permadani, kain-kain bulu, tule)</p> <p>b. Mesin-mesin yang untuk <i>pemeration, bleacing, dieiying, printing, finishing, texruring packing</i> dan sebagainya</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia persewaan organis dam logam mulia, elemen radio, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi pupuk, obat celup, obat pewarna, obat pernis, minyak eteris, dan resinonida wangi-wangian, obat kecantikan, dan obat rias, sabun deterjen, zat albumina, perekat, peledak, produk politeknik, koter api, piloforis, barang Foto grafi dan sinema</p>

		b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plasti dari selusa, karet- sintetik, karet tiruan, kulitsamak, jangat dan kulit mentah)
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil dan mesin kapal)
5	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu b. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sebagainya c. Dok terapung d. Perahu layar pakai atau tanpa motor e. Pesawat terbang dan helicopter segala jenis
6	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Sumber : Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2000, hal 263-265

Lampiran 4 : Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok IV
Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KM.03/2002

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Kontruksi	Mesin berat untuk kontruksi
2	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai/llistrik dari sumber luar c. Lokomotif atas rel lainnya d. Kereta gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberap alat e. Kapal penumpang, kapal barang khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu f. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar.

Sumber : Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2000, hal 266